

**BADAN KEUANGAN DAERAH  
KOTA SOLOK**



**AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERNTASAN KORUPSI**

**LAPORAN B 12**

**PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN  
SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

**TAHUN 2017**

b. Kendala yang dihadapi oleh BKD dalam pencairan belanja dana hibah dan bantuan sosial adalah :

- Untuk pencairan dana hibah kepada penerima hibah harus membuat perencanaan penggunaan dana hibah yang nantinya akan dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang berisi jumlah alokasi dana hibah dan tahapan-tahapan pencairannya. Apabila hibah tahap I telah dicairkan ke penerima hibah maka untuk tahap berikutnya penerima hibah harus menyampaikan pertanggungjawaban tahap I ke BKD setelah itu baru dapat diproses pencairan tahap berikutnya.
- Untuk pencairan dana bantuan sosial BKD terlebih dahulu meminta pertanggungjawaban dari realisasi bantuan tersebut sebesar yang disetujui oleh pimpinan karena bertolak dari tahun-tahun sebelumnya (2015) mereka lalai dalam pertanggungjawaban dari realisasi yang telah diterimanya.

## V. PENUTUP.

Kesimpulan:

1. Sesuai dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dengan pemberian besarnya tergantung kepada kemampuan keuangan daerah. Dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Belanja Hibah diberikan kepada masyarakat berupa uang kepada Pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi masyarakat yang secara spesifik tidak mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
3. Bantuan sosial diberikan kepada masyarakat berupa uang dari pemerintah yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini dibuat , untuk dapat menjadi bahan pertimbangan pada kegiatan RAD PPK dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyaluran serta penggunaan dana hibah dan bantuan sosial.

Solok, 15 Januari 2017

Kepala BKD

